



RENCANA KERJA TAHUN 2026

BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, situasi dan kondisi terkini, serta isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provsu tahun 2026 ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan bagi Badan Kepegawaian Provsu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2026.

Untuk selanjutnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi para *stakeholder* terkait dengan Rencana Kerja, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2026.

Medan, 2025
Kepala Badan Kepegawaian


SUTAN TOLANG LUBIS, S.STP, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19791210 198910 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapeg Perangkat Daerah Tahun	
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi	
Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.....	8
2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi	
Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.....	8
2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	
Hasil/Keluaran yang Direncanakan	12
2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya,	
Terpenuhinya, atau Melebihi Target Kinerja	
Program/Kegiatan	21
2.1.5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program	
Renstra Perangkat Daerah.....	21
2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran	
yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor	
Penyebab Tersebut.....	21
2.1.7. Realisasi Anggaran	21
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	30
2.3.1. Sejauh Mana Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat	
Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan	
Daerah	30
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam	
Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat	
Daerah	30

2.3.3.	Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>).....	31
2.3.4.	Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3.5.	Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan	33
2.4.	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	47
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	48
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	48
3.1.1.	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025	48
3.1.2.	Program Prioritas Nasional Badan Kepegawaian Negara	48
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	50
3.3.	Program dan Kegiatan.....	51
3.3.1.	Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	51
3.3.2.	Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan	52
3.3.3.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas.....	56
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPEG PROVSU	65
BAB V	PENUTUP	66
5.1.	Catatan Penting yang Perlu Diperhatikan.....	66
5.2.	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	66
5.3.	Rencana Tindak Lanjut.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diwajibkan agar menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan mempedomani Renstra serta mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.

Penyusunan Renja OPD dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2026, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provsu dalam rangka mencapai target Indikator Sasaran Badan Kepegawaian yaitu Nilai Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN.

Dengan disusunnya Renja Badan Kepegawaian Provsu Tahun 2026 ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada *stakeholder* serta lingkup Internal Badan Kepegawaian Provsu tentang arah pelaksanaan program kerja Badan Kepegawaian Provsu pada Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;

15. Peraturan Menteri PPPA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2026;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;

- 24.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 25.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- 26.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
- 27.Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
- 28.Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 29.Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 000.7.2/2264/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 tanggal 12 Maret 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian tahun 2026 telah disusun dengan maksud dan tujuan:

- 1. Sebagai Acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian, dengan menjaga kesinambungan kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, dan

- Rancangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Badan Kepegawaian Provsu;
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian;
 3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Badan Kepegawaian.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sistematika penulisan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat untuk Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Evaluasi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, dan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPEG PROVSU

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024, Badan Kepegawaian Provsu telah didukung oleh 2 Program, 9 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Sehubungan dengan berakhirnya tahun Anggaran 2024 Badan Kepegawaian Provsu telah memaparkan sejauh mana tingkat keberhasilan dan realisasi kinerja Badan Kepegawaian Provsu selama tahun 2024 yang dilihat dari tingkat capaian kinerja program/kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi keuangan dan secara resmi telah disampaikan laporan kepada Gubernur Cq. Bappeda Provsu melalui dokumen Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Badan Kepegawaian Provsu Tahun 2024. Sedangkan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provsu pada tahun 2024, Badan Kepegawaian Provsu telah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Biro Organisasi Setdaprovsu.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian Provsu telah melaksanakan Program dan kegiatan yang disertai dengan target serta pagu anggaran, tidak ada program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Program/kegiatan yang telah memenuhi kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Kepegawaian Provsu pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Pengadaan, pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN.

1. Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN.

Pada tahun 2024 formasi kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah:

- 1) PPPK 600 orang (300 orang tenaga guru dan 300 orang tenaga teknis). Total yang lulus tahap I ialah 588 orang (299 orang tenaga guru dan 289 orang tenaga teknis).
- 2) CPNS 851 orang (100 orang tenaga kesehatan dan 751 orang tenaga teknis). Total yang lulus 693 orang (76 orang tenaga kesehatan dan 617 orang tenaga teknis).

Untuk pengadaan PPPK dan CPNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara formasi Tahun 2024 sampai dengan penyerahan SK diselesaikan pada awal tahun 2025, dengan tahapan-tahapan: pendaftaran, seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), pengumuman hasil seleksi, masa sanggah, pengumuman pasca sanggah, dan pemberkasan. Untuk sub kegiatan evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN telah disusun 2 laporan kegiatan untuk pengadaan CPNS dan PPPK sehingga capaian untuk kegiatan ini adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan di awal Tahun 2024 yakni 2 laporan.

2. Fasilitasi lembaga profesi ASN.

Lembaga KORPRI Provsu adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang kelembagaannya melekat di Badan Kepegawaian Provsu. KORPRI berperan sebagai wadah bagi PNS untuk meningkatkan kompetensi, memperjuangkan hak-hak dan menjaga profesionalisme sebagai abdi negara dengan berbagai kegiatan antara lain: pembinaan mental dan spiritual anggota, olahraga, pelatihan keterampilan, serta kegiatan sosial lainnya. Setiap tahun kegiatan tersebut didanai dari dana hibah yang diserahkan di awal triwulan pertama.

3. Evaluasi data, informasi, dan sistem informasi kepegawaian.

Evaluasi data, informasi, dan sistem informasi kepegawaian adalah proses penting untuk memastikan bahwa data kepegawaian akurat, informasi yang dihasilkan relevan, dan sistem informasi yang digunakan efektif dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap kualitas data,

keandalan sistem, kemudahan penggunaan, dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Namun, untuk menghasilkan data yang akurat diperlukan keaktifan setiap ASN untuk memperbaharui data pribadi secara berkala. Laporan dari kegiatan evaluasi data, informasi, dan sistem informasi kepegawaian disajikan di akhir tahun yang berjumlah 1 laporan.

B. Mutasi dan Promosi

1. Pengelolaan mutasi ASN.

Pengelolaan mutasi ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah serangkaian proses untuk memindahkan pegawai ASN dari satu jabatan ke jabatan lain, baik dalam satu instansi maupun antar instansi. Tujuannya adalah untuk penataan organisasi, pengembangan karir pegawai, serta pemenuhan kebutuhan pegawai di berbagai unit kerja. Data mutasi ASN selama tahun 2024 ditargetkan sebanyak 573 dokumen dan terealisasi 100% sejumlah 573 dokumen.

2. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN.

Pengelolaan kenaikan pangkat ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah proses yang penting dalam manajemen kepegawaian untuk memberikan penghargaan atas kinerja dan pengabdian PNS (Pegawai Negeri Sipil) terhadap negara. Kenaikan pangkat dilakukan secara periodik, biasanya dua kali setahun, yaitu periode April dan Oktober, dan mulai tahun 2024, berlaku enam periode (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember). Data kenaikan pangkat ASN selama tahun 2024 ditargetkan sebanyak 6.532 dokumen dan terealisasi 100% sejumlah 6.532 dokumen.

3. Pengelolaan promosi ASN.

Pengelolaan promosi ASN (Aparatur Sipil Negara) diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023. Promosi ASN dilakukan berdasarkan sistem merit, yang menekankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan merata. Data pengelolaan promosi ASN selama tahun 2024 ditargetkan sebanyak 92 dokumen dan terealisasi 100% sejumlah 92 dokumen.

C. Pengembangan Kompetensi ASN

1. Peningkatan kapasitas kinerja ASN.

Peningkatan kapasitas kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara lebih efektif dan efisien. Data peningkatan kapasitas kinerja ASN selama tahun 2024 ditargetkan sebanyak 150 orang dan terealisasi 100% sejumlah 150 orang.

2. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN.

Pengelolaan pendidikan lanjutan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan formal. Ini mencakup berbagai program seperti tugas belajar, izin belajar, dan penyediaan beasiswa, yang semuanya diatur dalam perundang-undangan dan kebijakan terkait. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ASN yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks. Data pengelolaan pendidikan lanjutan ASN selama tahun 2024 ditargetkan sebanyak 30 dokumen dan terealisasi 100% sejumlah 30 orang.

3. Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN.

Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN (Aparatur Sipil Negara) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh kepada para ASN mengenai jabatan fungsional, termasuk kebijakan terkait, tugas, tanggung jawab, hak, dan jenjang karirnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan ASN mengenai jabatan fungsional, serta mendorong pengembangan karir mereka dalam jabatan tersebut. Data pengelolaan pendidikan lanjutan ASN selama tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 laporan dan terealisasi 100% sejumlah 1 laporan.

4. Pembinaan jabatan fungsional ASN.

Pembinaan Jabatan Fungsional (JF) ASN adalah upaya untuk meningkatkan dan mengendalikan standar profesi JF, yang meliputi pengelolaan, prosedur, metodologi pelaksanaan tugas, dan penilaian kinerja pejabat fungsional. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa JF ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas dan jabatan yang diemban, serta berkontribusi optimal bagi organisasi. Data pengelolaan pendidikan

lanjutan ASN selama tahun 2024 ditargetkan sebanyak 2.025 orang laporan dan terealisasi 100% sejumlah 2.025 orang.

D. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

1. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur bertujuan untuk mengukur kinerja aparatur, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memberikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, hingga tindak lanjut hasil penilaian. Data pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur selama tahun 2024 ditargetkan sebanyak 492 dokumen dan terealisasi 100% sejumlah 492 dokumen.

2. Pengelolaan, pemberian penghargaan bagi pegawai.

Pengelolaan dan pemberian penghargaan bagi pegawai adalah upaya sistematis untuk memberikan pengakuan dan imbalan atas kinerja, kontribusi, dan pencapaian pegawai dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja pegawai, serta membangun lingkungan kerja yang positif. Data pengelolaan, pemberian penghargaan bagi pegawai selama tahun 2024 ditargetkan sebanyak 2.670 orang dan terealisasi 100% sejumlah 2.670 orang.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Program/kegiatan yang telah memenuhi kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Kepegawaian Provsu pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN

1. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan proses pemberhentian pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan dokumen, verifikasi, hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengurusan hak-hak terkait pensiun. Data koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian selama tahun 2024 ditargetkan

sebanyak 1.025 dokumen dan terealisasi 117,07% sebanyak 1.200 dokumen.

B. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

1. Pembinaan Disiplin ASN

Pembinaan disiplin ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa ASN mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab mereka dengan penuh disiplin. Pembinaan ini meliputi kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan penyusunan peraturan bidang kepegawaian. Data pembinaan disiplin ASN selama tahun 2024 ditargetkan sebanyak 42 orang dan terealisasi 107,14% sejumlah 45 orang.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian s.d. Tahun 2025 diuraikan pada tabel T-C. 29

TABEL T-C. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S.D. TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s.d. Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan Kepegawaian		100%	98,51%	100%	102,24%	110,94%	100%	99,17%	98,98
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Bapeg Provsu	100%	100%	100%	100%	117,41%	100%	100%	98,10
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bapeg	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00%	14 Dokumen	42 Dokumen	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Bapeg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s.d. Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	100,00%	120 Orang	360 Orang	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3.600 Dokumen	1.200 Dokumen	1.200 Dokumen	1.200 Dokumen	100,00%	1.200 Dokumen	3.600 Dokumen	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	97,50
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	2 Paket	6 Paket	100,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	-	20 Orang	20 Orang	100,00%	360 Orang	380 Orang	95,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	94,86
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pemenuhan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	2 Paket	100,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s.d. Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	10 Paket	83,33
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	7 Dokumen	87,50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	300 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	100%	90 Laporan	590 Laporan	98,33
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,23
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950 Laporan	650 Laporan	600 Laporan	600 Laporan	100%	650 Laporan	1.900 Laporan	97,44
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	24 Laporan	72 Laporan	100,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s.d. Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	0,00%	1 Laporan	1 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	3 Laporan	7 Laporan	87,50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	6 Unit	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	100%	23 Unit	75 Unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	- Unit	- Unit		- Unit	0 Unit	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s.d. Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	0 Unit	60 Unit	60 Unit	100%	45 Unit	45 Unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	97,02%	100%	104,47%	104,47%	100%	98,33%	99,86
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	100%	96,09%	100%	117,01%	117,01%	100%	94,52%	98,89
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	100
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3.600 Dokumen	1.100 Dokumen	1.025 Dokumen	1.200 Dokumen	117,07%	1.100 Dokumen	3.400 Dokumen	94,44
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	41 Dokumen	41 Dokumen	0 Dokumen	- Dokumen		- Dokumen	41 Dokumen	100,00
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s.d. Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Mutasi dan Promosi	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%	9,27%	100%	100%	100%	100%	101,48%	101,73
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1.650 Dokumen	600 Dokumen	573 Dokumen	573 Dokumen	100%	550 Dokumen	1.723 Dokumen	104,42
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	21.000 Laporan	8.176 Laporan	6.532 Laporan	6.532 Laporan	100%	6.600 Laporan	21.308 Laporan	101,47
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2.100 Dokumen	1.893 Dokumen	92 Dokumen	92 Dokumen	100%	100 Dokumen	2.085 Dokumen	99,29
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100%	93,27%	100%	100%	100%	100%	93,09%	96,94
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	450 Orang	120 Orang	150 Orang	150 Orang	100%	150 Orang	420 Orang	93,33
	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Terlaksananya Proses Sistem Merit	1 Laporan	1 Laporan	-	-		-	1 Laporan	100
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	150 Dokumen	98 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	15 Dokumen	143 Dokumen	95,33
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	13 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	- Dokumen	0,00%	1 Dokumen	13 Dokumen	100

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s.d. Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	6.000 Orang	1.355 Orang	2.025 Dokumen	2.025 Dokumen	100%	2.200 Orang	5.580 Orang	93
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100%	99,47%	100%	100,87%	100,87%	100%	104,24%	101,86
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.476 Dokumen	492 Dokumen	492 Dokumen	492 Dokumen	100%	492 Dokumen	1.476 Dokumen	100
	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	7.950 Orang	2.883 Orang	2.670 Orang	2.670 Orang	100%	2.800 Orang	8.353 Orang	105,07
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	126 Orang	42 Orang	42 Orang	45 Orang	107,14%	42 Orang	129 Orang	102,38
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	- Laporan	0,00%	- Laporan	25 Laporan	100
JUMLAH			100%	98,51%	100%	102,24%	110,94%	100%	99,17%	98,98

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya, atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

Dari hasil realisasi capaian kinerja Badan Kepegawaian Provsu dengan satu program prioritas yaitu program kepegawaian daerah yang semua kegiatan/sub kegiatannya tercapai dan melebihi target yang ditetapkan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa factor pendorong, yaitu:

1. Adanya SDM aparatur Badan Kepegawaian yang kompeten.
2. Adanya hubungan koordinasi dan konsultasi yang baik ke instansi pusat, perangkat daerah di lingkungan Pemprovsu dan Kabupate/Kota se-Sumatera Utara.

2.1.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Dengan tercapainya target program/kegiatan Badan Kepegawaian Provsu maka implikasi yang timbul adalah semakin terarahnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dituang dalam program kegiatan pada renstra Badan Kepegawaian Provsu Tahun 2025-2029.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Kebijakan/tindakan yang diambil untuk pelaksanaan seluruh program/kegiatan Badan Kepegawaian antara lain:

1. Perlu dilaksanakan pembinaan yang berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi ASN Badan Kepegawaian Provsu.
2. Perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program kegiatan.
3. Perlu terus melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi pusat, perangkat daerah, dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

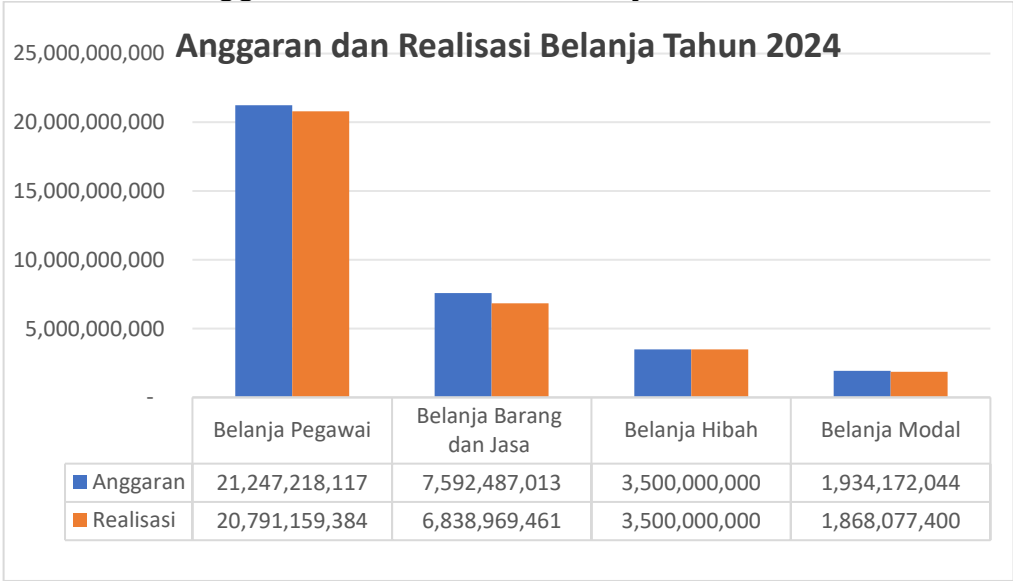
2.1.7 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Provsu yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Provsu adalah sebagai berikut :

1. Pagu Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 34.273.877.174,- dengan rincian :
 - Belanja Pegawai Rp. 21.247.218.117,-
 - Belanja Barang dan jasa Rp. 7.592.487.013,-
 - Belanja Hibah Rp. 3.500.000.000,-
 - Belanja Modal Rp. 1.934.172.044,-
2. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 adalah Rp. 32.998.206.245,- atau 96,28% dengan rincian :

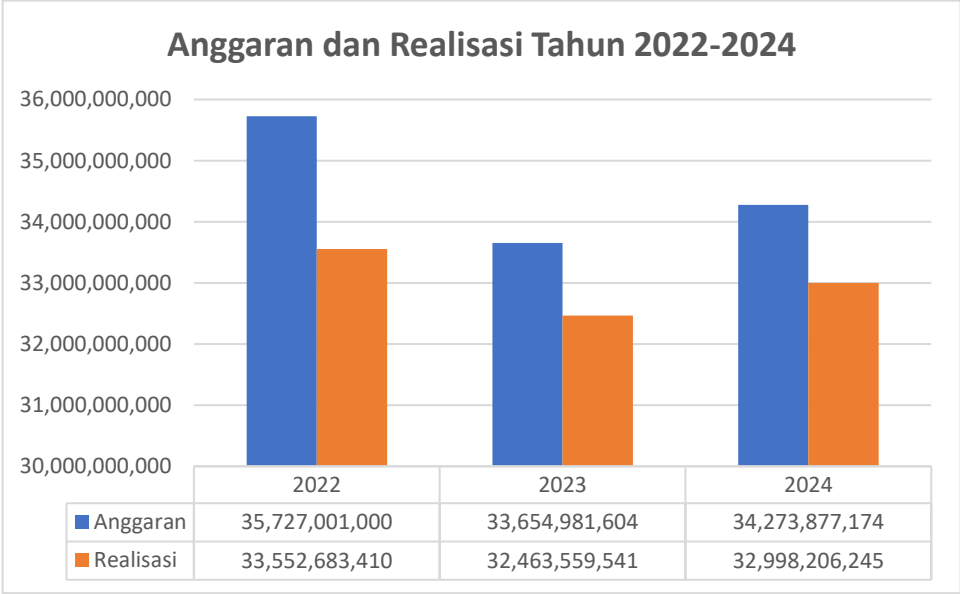
- Belanja Pegawai Rp. 20.791.159.384,- (97,85%)
- Belanja Barang dan jasa Rp. 6.838.969.461,- (90,08%)
- Belanja Hibah Rp. 3.500.000.000,- (100%)
- Belanja Modal Rp. 1.868.077.400,- (96,58%)

Grafik 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024



Capaian kinerja pada Badan Kepegawaian Provsu dapat dicapai salah satunya dengan dukungan anggaran dana yang terealisasi dari APBD Provinsi Sumatera Utara, yang perkembangannya dari tahun 2022 – 2024 digambarkan dalam *chart* berikut :

Grafik 2.2
Anggaran dan Realisasi Tahun



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2024, Badan Kepegawaian telah menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Biro Organisasi SetdaprovSU, yaitu :

Tabel 1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapeg Provsu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	340 Poin

Nilai Sistem Merit diukur dengan menggunakan 8 (delapan) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, pada pasal 6 diktum kedua, antara lain:

- 1. Perencanaan kebutuhan;
- 2. Pengadaan;
- 3. Pengembangan karir;
- 4. Promosi dan mutasi;
- 5. Manajemen kinerja;
- 6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
- 7. Perlindungan dan pelayanan;
- 8. Sistem informasi;

Indikator dari setiap dimensi dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Perencanaan Kebutuhan, dengan sub aspek:
 - a. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK;
 - b. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan real time yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;
 - c. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja;

- d. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun yang berasal dari calon PNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain;
2. Pengadaan dengan sub aspek:
- a. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan yang dirinci menurut jumlah, jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja, baik dari CPNS, PPPK, ataupun PNS dari instansi lain (untuk instansi tertentu);
 - b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub/Perbup/Perwal) terkait pengadaan ASN dan TNI/POLRI (untuk instansi tertentu) secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;
 - c. Pelaksanaan penerimaan calon PNS/PPPK/PNS dari instansi lain dilakukan secara terbuka;
 - d. Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi calon PNS;
 - e. Persentase pegawai yang baru diangkat menjadi PNS yang penempatan pertamanya sesuai jabatan yang dilamar;
3. Pengembangan Karir dengan sub aspek;
- a. Ketersediaan standar kompetensi manajerial, teknis dan *social cultural* untuk setiap jabatan;
 - b. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
 - c. Ketersediaan Talent Pool dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
 - d. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
 - e. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
 - f. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;
 - g. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas;
 - h. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;

- i. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;
 - j. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring;
4. Promosi dan Mutasi dengan sub aspek
- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/ Perwal) tentang pola karir;
 - b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif;
5. Manajemen Kinerja
- a. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;
 - b. Penggunaan metode penilaian kinerja yang objektif;
 - c. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kerja;
 - d. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;
 - e. Ketersediaan kebijakan internal yang mengatur hubungan antara hasil penilaian kinerja dengan memberi prioritas terhadap pegawai yang berkinerja tinggi dalam pembinaan dan pengembangan karir;
6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
- a. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
 - b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) untuk memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi luar biasa;
 - c. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;

- d. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;
7. Perlindungan dan Pelayanan
- a. Kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional;
 - b. Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.
8. Sistem Informasi
- a. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;
 - b. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online;
 - c. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - d. Pembangunan dan penggunaan *assessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.

Dalam penilaiannya, Ada 4 (empat) kategori indeks penerapan sistem merit ASN yaitu :

- 1. Kategori I dengan Predikat Buruk dilakukan audit dan supervisi sampai dengan kategori baik;
- 2. Kategori II dengan Predikat Kurang dibimbing sampai dengan kategori baik;
- 3. Kategori III dengan Predikat Baik diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan dari KASN dan dievaluasi setiap tahun;
- 4. Kategori IV dengan predikat Sangat Baik dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool* dan dievaluasi 2 tahun sekali.

Tabel 2.1

Kategori Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

No	Kategori	Nilai	Indeks	Sebutan
1	Kategori IV	325-400	0,81-1	Sangat Baik
2	Kategori III	250-324	0,61-0,8	Baik
3	Kategori II	175-249	0,41-0,6	Kurang
4	Kategori I	100-174	0,2-0,4	Buruk

Sumber: Permenpan & RB Nomor 40 tahun 2018

Penilaian Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 492 Tahun 2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Desember 2024 dari target di awal tahun 2024 Nilai Sistem Merit 340 poin, terealisasi 101,03% yakni 343,5 poin.

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian mulai tahun 2025, menjadi 2 indikator yaitu Nilai Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN. Adapun pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Provsu disajikan dalam tabel berikut:

TABEL T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Nilai Sistem Merit	-	-	340	343,5	344	344	343,5	343,5	344	344	-
2	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	79,94	80,15	80,25	-	79,94	80,15	80,25	-



Gambar 2.1 Piagam Penghargaan Pencapaian Kategori Sangat Baiak Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 sudah melampau target. Akan tetapi masih ada beberapa catatan dari BKN sebagaimana terlampir dalam Keputusan di atas untuk diperbaiki pada tahun 2025. Adapun catatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekomendasi Langkah-Langkah Penataan/Perbaikan
Aspek-Aspek Yang Terkait dengan Pelaksanaan Sistem Merit

NO.	ASPEK SISTEM MERIT	REKOMENDASI BKN
1.	Perencanaan Kebutuhan	NIHIL
2.	Pengadaan	Melaksanakan kebijakan internal mengenai seleksi mutasi masuk untuk menyaring secara kompetitif pegawai dari instansi luar yang mengajukan mutasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3.	Pengembangan Karier	1) Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk JPT Madya dan Jabatan Administrator; 2) Melanjutkan asesmen kompetensi agar lebih banyak pegawai yang terpetakan profil kompetensinya; 3) Melakukan pemetaan pegawai ke dalam talent pool dan rencana suksesi sesuai ketentuan nasional; 4) Melanjutkan penyusunan analisis kesenjangan kinerja bagi seluruh OPD dan seluruh jenjang jabatan; 5) Menyempurnakan metode untuk menghasilkan analisis kesenjangan kompetensi melalui metode asesmen kompetensi; 6) Menyempurnakan penyusunan dokumen HCDP agar didalamnya memuat rencana kebutuhan pengembangan kompetensi baik secara klasikal maupun nonklasikal yang

NO.	ASPEK SISTEM MERIT	REKOMENDASI BKN
		disusun berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi pegawai; 7) Menyusun kebijakan internal pedoman pelaksanaan magang pegawai di lingkungan instansi dan melaksanakan magang dengan durasi yang lebih memadai untuk peningkatan kompetensi; 8) Melaksanakan coaching dan mentoring secara rutin dan terjadwal di seluruh OPD; 9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan coaching dan mentoring untuk melihat keberlangsungan coaching dan mentoring di OPD.
4.	Promosi dan Mutasi	Menetapkan kebijakan internal mengenai manajemen talenta yang didalamnya memuat detail bobot setiap unsur pembentuk parameter potensial dan kinerja.
5.	Manajemen Kinerja	Melaksanakan analisis kesenjangan kinerja, serta membangun dan menerapkan mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap strategi/rencana aksi mengatasi permasalahan kinerja.
6.	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	Melaksanakan pemberian penghargaan secara rutin kepada pegawai berprestasi.
7.	Perlindungan dan Pelayanan	NIHIL
8.	Sistem Informasi	Melanjutkan pelaksanaan asesmen kompetensi kepada pegawai yang belum pernah dilakukan asesmen.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Sejauh Mana Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provsu, senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan Instansi terkait antara lain Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Badan Kepegawaian Negara, Perangkat Daerah terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara. Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan keselarasan, keterpaduan, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Provsu.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hamatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain:

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengadaan ASN (mutasi masuk) belum optimal	Pengadaan ASN (mutasi masuk) belum sepenuhnya mengakomodir pada kebutuhan riil dan kompetensi jabatan.	Belum optimalnya pelaksanaan Pengadaan ASN khususnya seleksi mutasi masuk dari instansi luar sesuai kebutuhan riil dan kompetensi jabatan.
2	Pelaksanaan pengembangan karir ASN belum optimal.	• Pelaksanaan penempatan JPT, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan jabatan pelaksana belum sepenuhnya sesuai kualifikasi dan kompetensi. • Belum optimalnya profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi. • ASN yang berkinerja tinggi belum sepenuhnya diprioritaskan untuk promosi. • Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi baik secara klasikal maupun nonklasikal.	• Belum selesainya penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk semua jenjang jabatan. • Belum optimalnya penerapan <i>talent pool</i> dan <i>assessment</i> ASN • Belum sinkronnya penilaian kinerja individu ASN dengan <i>talent mapping</i>. • Penyusunan dokumen HCDP masih dalam proses.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja belum optimal	Penilaian kinerja belum sepenuhnya objektif	Dalam memberikan penilaian atasan belum sepenuhnya objektif
4	Pengembangan kompetensi ASN belum dilaksanakan secara optimal	• Belum optimalnya hasil Analisa kebutuhan diklat/ Analisa pengembangan kompetensi ASN • Penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan formasi kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan	• Belum optimalnya database kompetensi ASN • Belum optimalnya pemanfaatan Anjab dan ABK dalam penataan pegawai
5	Sistem Informasi kepegawaian dan layanan kepegawaian belum optimal	Sistem Informasi kepegawaian dan layanan kepegawaian belum sepenuhnya berbasis online	• Belum tersedianya Database kepegawaian yang <i>realtime</i> dan lengkap • Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dan layanan kepegawaian dengan pusat/ provinsi/ lembaga lainnya. • Belum maksimalnya pengembangan aplikasi SIMPEG dan E-Kinerja Badan Kepegawaian • Adanya pergantian personal Teknis Pengelola aplikasi.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provsu tidak berkaitan secara langsung dengan NSPK dan SPM, hanya berkaitan dengan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) / *Sustainable Development Goals* Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen rencana aksi yang menjadi landasan bagi pelaksana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian

tujuan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan TPB/SDGs berisi 17 (Tujuh Belas), yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

Dari 17 Tujuan SDGs Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provsu adalah tujuan kelima yaitu Kesenjangan Gender. Permasalahan dan hambatan yang ada pada Badan Kepegawaian Provsu tidak berdampak secara langsung terhadap Kesenjangan Gender.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Perangkat Daerah.

Tantangan dalam pelayanan kepegawaian antara lain:

1. Kebutuhan adaptasi ASN terhadap perubahan;
ASN dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas
2. Peningkatan profesionalisme ASN
Diperlukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN agar dapat memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik yang prima.
3. Tuntutan adanya sistem informasi Kepegawaian terpadu yang memungkinkan akses data dan informasi kepegawaian secara

lengkap, akurat, dan terkini adalah bahan pengambilan keputusan untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap pegawai.

Peluang-peluang dalam kepegawaian antara lain:

1. Optimalisasi Penerapan Sistem Manajemen ASN berbasis Meritokrasi;

Badan Kepegawaian memiliki peluang untuk memperkuat penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas birokrasi.

2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian;

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

4. Peningkatan pelayanan publik;

Badan Kepegawaian dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan sistem rekrutmen, pengembangan karir, dan manajemen kinerja ASN yang berbasis kompetensi.

5. Penguatan kerja sama;

Badan Kepegawaian dapat memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang kepegawaian.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Berdasarkan kondisi dan situasi di lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, maka isu-isu strategis pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang telah dirumuskan adalah:

1. Belum optimalnya pengadaan ASN (mutasi masuk);
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan karir ASN;
3. Belum optimalnya pemberian tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
4. Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN;
5. Belum optimalnya sistem Informasi Kepegawaian dan Layanan Kepegawaian.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Draft RKPD Provsu tahun 2026 yang diekspos Bappelitbang Provsu kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemprovsu merupakan gambaran arah dalam penyusunan program dan kegiatan pada OPD. Badan Kepegawaian sendiri telah mereview RKPD tersebut dan tidak ada yang perlu dikoreksi lebih lanjut, hal ini disebabkan karena pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam penyusunan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan hal ini dikarenakan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana Perangkat Daerah hanya melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Adapun reviu terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada lampiran Renja Bapeg pada Tabel T-C. 31 berikut:

Tabel T-C.3.1

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	3	4	4	5	6 (Rp.)	7	8	9	10	11 (Rp.)	12
1	Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	Medan		100%	32.561.515.047	Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	Medan		100%	32.561.515.047	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100%	30.141.966.595	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100%	30.141.966.595	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bapeg	100%	15.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bapeg	100%	15.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	15.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	15.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Bapeg	100%	21.979.580.810	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Bapeg	100%	21.979.580.810	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	3	4	4	5	6 (Rp.)	7	8	9	10	11 (Rp.)	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Medan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 PNS	21.792.140.810	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Medan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 PNS	21.792.140.810	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Medan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	1.250 Dokumen	187.440.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Medan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.250 Dokumen	187.440.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	340 PNS	614.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	340 PNS	614.400.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Medan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	331.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Medan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	331.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Medan	Jumlah PNS BAPEG yang mengikuti diklat dan pelatihan	20 Orang	229.800.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Medan	Jumlah PNS BAPEG yang mengikuti diklat dan pelatihan	20 Orang	229.800.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	340 PNS	53.600.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	340 PNS	53.600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.291.766.041	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.291.766.041	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	3	4	4	5	6 (Rp.)	7	8	9	10	11 (Rp.)	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	61.455.216	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	61.455.216	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 Paket	817.851.805	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 Paket	817.851.805	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	594.145.020	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	594.145.020	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Medan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	153.910.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Medan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	153.910.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	15.444.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	15.444.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	1.648.960.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	1.648.960.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	3	4	4	5	6 (Rp.)	7	8	9	10	11 (Rp.)	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Aset Kantor		29.018.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Aset Kantor		29.018.800	
	Pengadaan Mebel	Medan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	29.018.800	Pengadaan Mebel	Medan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	29.018.800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.089.094.720	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.089.094.720	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650 Laporan	2.130.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650 Laporan	2.130.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	971.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	971.700.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.070.264.720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.070.264.720	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	2	3	4	5 (Rp.)	6	7	8	9	10 (Rp.)	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	1.122.606.224	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	1.122.606.224	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Medan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	39.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Medan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	39.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	422.080.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	422.080.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	561.726.224	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	561.726.224	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Medan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	116 unit	99.800.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Medan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	116 unit	99.800.000	
	Program Kepegawaian Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	2.419.548.452	Program Kepegawaian Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	2.419.548.452	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	2	3	4	5 (Rp.)	6	7	8	9	10 (Rp.)	11
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Medan	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	100%	387.390.080	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Medan	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	100%	387.390.080	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Medan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 Laporan	299.290.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Medan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 Laporan	299.290.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1.200 Dokumen	24.000.080	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1.200 Dokumen	24.000.080	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK	Medan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	54.100.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK	Medan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	54.100.000	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Medan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	10.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Medan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	10.000.000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	41 Dokumen	-	Pengelolaan Data Kepegawaian	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	41 Dokumen	-	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Medan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	-	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Medan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	-	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	2	3	4	5 (Rp.)	6	7	8	9	10 (Rp.)	11
	Mutasi dan Promosi ASN	Medan	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	100 %	871.180.000	Mutasi dan Promosi ASN	Medan	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	100 %	871.180.000	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	700 Dokumen	22.300.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	700 Dok	22.300.000	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Medan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	7.050 Laporan	34.980.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Medan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	7.050 Laporan	34.980.000	
	Pengelolaan Promosi ASN	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	550 Dokumen	813.900.000	Pengelolaan Promosi ASN	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	550 Dok	813.900.000	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Medan	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100%	848.616.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Medan	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100%	848.616.000	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Medan	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	170 PNS	40.060.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Medan	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	170 PNS	40.060.000	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	15 PNS	611.800.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	15 PNS	611.800.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	2	3	4	5 (Rp.)	6	7	8	9	10 (Rp.)	11
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	27.500.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dok	27.500.000	
	Penyusunan Adminitrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Medan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	27 Orang	24.000.000	Penyusunan Adminitrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Medan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	27 Org	24.000.000	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	33.900.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dok	33.900.000	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Medan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	26.400.000	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Medan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	26.400.000	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Medan	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	1.000 Orang	84.956.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Medan	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	1.000 Orang	84.956.000	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Medan	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100%	312.362.372	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Medan	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100%	312.362.372	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	492 Dokumen	98.022.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	492 Dok	98.022.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	2	3	4	5 (Rp.)	6	7	8	9	10 (Rp.)	11
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Medan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1.000 PNS	145.510.372	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Medan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1.100 PNS	145.510.372	
	Pembinaan Disiplin ASN	Medan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	53.470.000	Pembinaan Disiplin ASN	Medan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	110 Orang	53.470.000	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50 Laporan	15.360.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	55 Laporan	15.360.000	
	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI	Medan			1.578.155.928	UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI	Medan			1.578.155.928	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100%	1.578.155.928	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100%	1.578.155.928	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Bapeg	100%	52.560.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Bapeg	100%	52.560.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Medan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	52.560.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Medan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dok	52.560.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	22.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	22.600.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	2	3	4	5 (Rp.)	6	7	8	9	10 (Rp.)	11
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Medan	-	20 PNS	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Medan	-	20 PNS	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	22.600.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Org	22.600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Medan	Persentase Pemenhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	466.088.866	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Medan	Persentase Pemenhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	466.088.866	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.774.126	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.774.126	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	304.999.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	304.999.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	150.315.440	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	150.315.440	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Medan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Keperluan BAPEG	12 Bulan	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Medan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Keperluan BAPEG	12 Bulan	-	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	2	3	4	5 (Rp.)	6	7	8	9	10 (Rp.)	11
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	868.480.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	868.480.400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	198.736.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	198.736.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	669.744.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	669.744.400	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	2	3	4	5 (Rp.)	6	7	8	9	10 (Rp.)	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Medan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	168.426.662	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Medan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	168.426.662	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	49.008.550	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	49.008.550	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	1 Unit	119.418.112	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	1 unit	119.418.112	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Medan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Medan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 unit	0	
	Program Kepegawaian Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	0	Program Kepegawaian Daerah	Medan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	0	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Medan	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100%	-	Pengembangan Kompetensi ASN	Medan	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100%	-	
	Pengelolaan Assessment Center	Medan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1.850 Dokumen	-	Pengelolaan Assessment Center	Medan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1.850 Dok	-	
JUMLAH				100%	34.139.670.975				100%	34.139.670.975	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 tidak mencantumkan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provsu yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga tidak ada usulan yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Provsu untuk ditampung pada Renja tahun 2026.

Tabel 2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Sumatera Utara

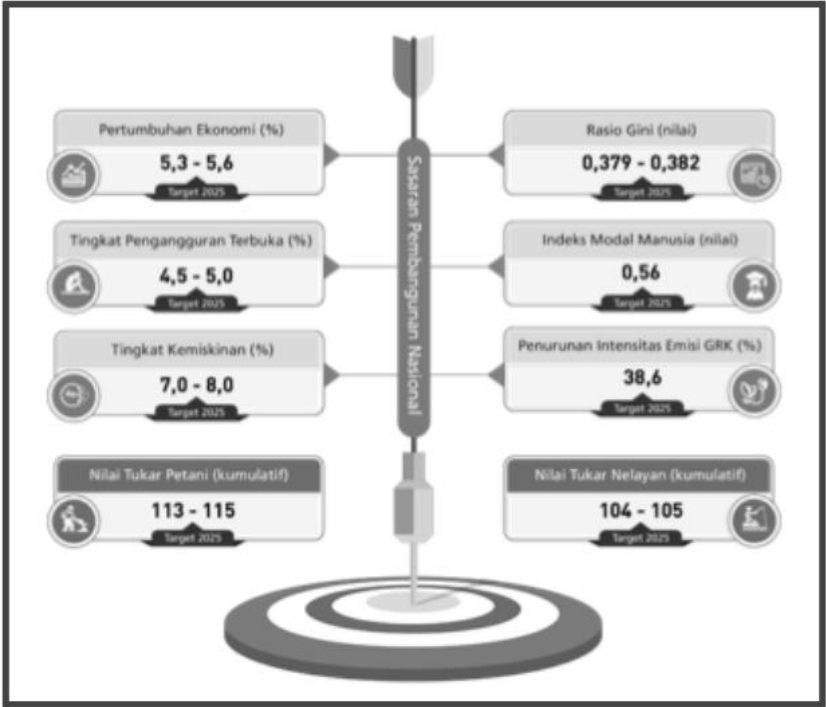
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 secara nasional menekankan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut:



Gambar 3.1 Sasaran Pembangunan Tahun 2025

3.1.2 Program Prioritas Nasional Badan Kepegawaian Negara

Program Prioritas Nasional (PPN) merupakan program yang dirancang untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada Tahun 2025 program kerja BKN yang masuk ke dalam prioritas nasional terdapat 5 (lima) program, yaitu:

1. Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem Pensiun
Penyusunan rekomendasi kebijakan roadmap penerapan sistem pensiun dengan target 1 rekomendasi kebijakan dan pagu sebesar Rp 1.500.000.000. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan roadmap penerapan sistem pensiun yang berisi tentang: a. Penyusunan skema sistem pensiun yang berkeadilan bagi pegawai ASN; dan b. Penyusunan kajian kelembagaan yang paling tepat dalam pengelolaan pensiun pegawai ASN.
2. Database Profile ASN Program Prioritas Nasional ini bertujuan untuk membentuk database profile ASN yang memiliki data komprehensif dalam pengelolaan manajemen talenta. Target dari program ini sebanyak 1 layanan dengan pagu sebesar Rp 2.350.000.000.
3. Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Penindakan atas Pelanggaran Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Target dari program ini sebanyak 100 rekomendasi dengan pagu sebesar Rp 2.000.000.000. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya penguatan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian BKN. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, maka pembagian peran terhadap fungsi tersebut adalah terkait kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, sedangkan fungsi pelaksanaan pengawasan sistem merit dilaksanakan oleh BKN. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengawasi apabila terdapat pelanggaran terhadap penerapan sistem merit sekaligus pemberian rekomendasi penindakan atas pelanggaran penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah.
4. Pembangunan UPT Jambi dan UPT Pangkal Pinang Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2024, dimana pada tahun sebelumnya BKN telah memangun 2 (dua) kantor UPT yaitu UPT Mataram dan UPT Gorontalo. Pembangunan kantor UPT ini bertujuan untuk pengembangan tugas dan fungsi serta pelayanan BKN ke daerah. Target dari program ini adalah sebanyak 2 (dua) UPT dengan pagu sebesar Rp 73.379.798.000.

5. Seleksi PPPK Tahap II Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari seleksi PPPK yang telah dilakukan pada akhir tahun 2024. Seleksi PPPK Tahap II bertujuan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN untuk pegawai yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus dan tenaga non-ASN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Tahap I; tenaga non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS; serta tenaga non-ASN yang belum mendaftar pada pengadaan ASN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rencana kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 didasarkan pada draft rancangan Renstra tahun 2025-2029 dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 merumuskan tujuan berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara Periode tahun 2025 s.d 2029. Visi Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara adalah **“Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”**. Misi Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik, dan Ramah Lingkungan
5. Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Misi yang selaras dengan tupoksi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah misi yang ketiga, yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah. Berdasarkan visi misi tersebut, tujuan Badan Kepegawaian Provsu yaitu **“Mewujudkan Profesionalitas ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”** dan sasaran Badan Kepegawaian Provsu ialah **“Terwujudnya Profesionalitas ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”**.

Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran tersebut diharapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik akan terwujud lebih optimal di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provsu, yaitu :

1. Nilai Sistem Merit dan
2. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

Untuk lebih jelas, di bawah ini dapat di lihat tabel tujuan, sasaran dan IKU Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah
Badan Kepegawaian Provsu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Mewujudkan Penerapan Manajemen ASN yang Profesional di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Terwujudnya Penerapan Manajemen ASN yang Profesional di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	Poin	343,5	344	344	345	345	346
			Indeks Profesionalitas ASN	Poin	79,94	80,15	80,25	80,35	80,45	80,55

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provsu tidak berdampak secara langsung terhadap Capaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, karena Badan Kepegawaian Provsu hanya Perangkat Daerah Penunjang di urusan kepegawaian sehingga tidak ada Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Provsu.

b. Pencapaian NSPK, SPM dan SDGs

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provsu tidak berkaitan secara langsung dengan NSPK dan SPM, hanya berkaitan dengan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)/ *Sustainable Development Goals* Provinsi Sumatera Utara.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. SDGs merupakan wujud komitmen seluruh negara- negara untuk melaksanakan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, diantaranya kesetaraan gender. Namun Capaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian Provsu tidak berdampak secara langsung terhadap capaian indikator Kesetaraan Gender.

c. Telahaan Responsif Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi komitmen internasional dan nasional, sama halnya dengan Provinsi Sumatera Utara. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan salah satu wujud pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran. Renja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan dan penganggaran program kegiatannya telah responsif gender.

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menyusun *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai wujud keseriusan Badan Kepegawaian Provsu untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun GBS adalah :

Program Kepegawaian Daerah

- | | | |
|--------------|---|--|
| Kegiatan | : | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
| Sub Kegiatan | : | 1. Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN;
2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian. |
| Kegiatan | : | Mutasi dan Promosi ASN |
| Sub Kegiatan | : | 1. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
2. Pengelolaan Promosi ASN. |
| Kegiatan | : | Pengembangan Kompetensi ASN |
| Sub Kegiatan | : | 1. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN |

3.3.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sesuai dengan butir 55 pasal 1 Bab 1 Permendagri 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada butir 56 dijelaskan bahwa Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara serta upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian telah menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019. Pada tahun 2026 program Badan Kepegawaian ada 2 Program,

kegiatan 11 dan sub kegiatan sebanyak 44. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan bahan logistik kantor;
 - Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan;
 - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - Pengadaan mebel.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan jasa surat menyurat;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- Pemeliharaan asset tetap lainnya.

b. Program Kepegawaian Daerah

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
 - Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN;
 - Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian;
 - Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK;
 - Fasilitasi Imbaga profesi ASN;
 - Pengelolaan data kepegawaian;
 - Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian.
2. Mutasi dan Promosi ASN;
 - Pengelolaan mutasi ASN;
 - Pengelolaan kenaikan pangkat ASN;
 - Pengelolaan promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
 - Peningkatan kapasitas kinerja ASN;
 - Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN;
 - Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat;
 - Penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi Jabatan Fungsional;
 - Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat Jabatan Fungsional;
 - Sosialisasi dan penyebaran informasi Jabatan Fungsional ASN;
 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai;
 - Pembinaan disiplin ASN;
 - Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin.

Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara telah membentuk UPTD Pusat Asesmen Kompetensi sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 pada UPTD tersebut adalah sebanyak 2 program, 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/perangan bangunan kantor;
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan bahan logistik kantor;
 - Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan jasa surat menyurat;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - Pemeliharaan asset tetap lainnya.

b. Program Kepegawaian Daerah

1. Pengembangan Kompetensi ASN
 - Pengelolaan assessment center.

3.3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provsu tahun 2026, maka perlu dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada tahun 2026. Hal ini dimaksudkan agar fokus pencapaian target kinerja didukung oleh pagu anggaran yang tersedia.

Kegiatan Strategis Daerah merupakan terobosan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan pada berbagai aspek di Provinsi Sumatera Utara yang maju, terukur dan terarah sesuai skala prioritas sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan berdampak positif pada masyarakat.

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebagai Perangkat Daerah yang mengelola kepegawaian turut serta merumuskan Kegiatan Strategis Daerah pada tahun 2026 yang spesifik pada peningkatan kompetensi dan kualifikasi ASN. Kegiatan Strategis pada Badan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. ASN Pintar

Peningkatan kompetensi dan kualifikasi ASN melalui kegiatan Strategis **ASN PINTAR (*beasiswa Tugas Belajar S3*)** dengan target adalah sebanyak 15 PNS.

2. Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian

Kegiatan ini adalah upaya untuk menjadikan pelayanan kepegawaian mudah, cepat dan efektif dan efisien.

3. Apresiasi ASN Berprestasi

ASN merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan atas dedikasi, inovasi, dan pencapaian para ASN perlu diberikan secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

PROVINSI SUMATERA UTARA

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja OPD Pelaksana
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara		100%	32.561.515.047	APBD		100%	37.744.198.518	
5	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100%	30.141.966.595	APBD		100%	33.055.871.518	
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bapreg	100%	15.500.000	APBD		100%	210.000.000	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	15.500.000	APBD		14 Dokumen	210.000.000	Bapreg Provsu
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Layanan Administrasi Keuangan Bapreg	100%	21.979.580.810	APBD		100%	24.188.504.103	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 PNS	21.792.140.810	APBD		125 PNS	23.971.344.103	Bapreg Provsu
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.250 Dokumen	187.440.000	APBD		1.250 Dokumen	217.160.000	Bapreg Provsu
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	614.400.000	APBD		100%	743.555.000	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja OPD Pelaksana
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	1.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	331.000.000	APBD		2 Paket	286.000.000	Bapeg Provsu
6	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS BAPEG yang mengikuti diklat dan pelatihan	20 Orang	229.800.000	APBD		20 Orang	226.755.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	340 PNS	53.600.000	APBD		340 PNS	230.800.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.291.766.041	APBD		100%	3.635.000.000	
5	03	01	1.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	61.455.216	APBD		5 Paket	45.000.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 Paket	817.851.805	APBD		62 Paket	1.350.000.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	594.145.020	APBD		12 Paket	860.000.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	153.910.000	APBD		12 Paket	150.000.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	15.444.000	APBD		5 Dokumen	30.000.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	1.648.960.000	APBD		600 Laporam	1.200.000.000	Bapeg Provsu

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja OPD Pelaksana
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Aset Kantor		29.018.800	APBD			120.000.000	
5	03	01	1.08		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	29.018.800	APBD		3 Paket	120.000.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.089.094.720	APBD		100%	2.984.812.415	
6	03	01	1.09		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650 Laporan	2.130.000	APBD		650 Laporan	30.000.000	Bapeg Provsu
7	03	01	1.10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	971.700.000	APBD		12 Laporan	989.600.000	Bapeg Provsu
8	03	01	1.11		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000	APBD		12 Laporan	45.000.000	Bapeg Provsu
9	03	01	1.12		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.070.264.720	APBD		2 Laporan	1.920.212.415	Bapeg Provsu
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	1.122.606.224	APBD		100%	1.174.000.000	
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	39.000.000	APBD		2 Unit	40.000.000	Bapeg Provsu

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja OPD Pelaksana
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	422.080.000	APBD		30 Unit	460.000.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	561.726.224	APBD		1 Unit	374.000.000	Bapeg Provsu
6	03	01	1.10		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	99.800.000	APBD		116 Unit	300.000.000	Bapeg Provsu
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	2.419.548.452	APBD		100%	4.688.327.000	
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	100%	387.390.080	APBD		100%	721.500.000	
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 Laporan	299.290.000	APBD		2 Laporan	401.820.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1.200 Dokumen	24.000.080	APBD		1.200 Dokumen	109.680.000	Bapeg Provsu
6	03	02	1.02	07	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	54.100.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	10.000.000	APBD		1 Lembaga	50.000.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	41 Dokumen	-	APBD		41 Dokumen	50.000.000	Bapeg Provsu

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja OPD Pelaksana
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	60.000.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%	871.180.000	APBD		100%	1.328.176.000	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	700 Dokumen	22.300.000	APBD		700 Dokumen	129.680.000	Bapeg Provsu
	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	7.050 Laporan	34.980.000	APBD		7.050 Laporan	167.020.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	550 Dokumen	813.900.000	APBD		550 Dokumen	1.031.476.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100%	848.616.000	APBD		100%	1.703.930.000	
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	170 PNS	40.060.000	APBD		170 PNS	200.000.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	15 PNS	611.800.000	APBD		15 PNS	600.000.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	27.500.000	APBD		1 Dokumen	159.000.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Adminitrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	27 Orang	24.000.000	APBD		27 Orang	152.600.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	33.900.000	APBD		1 Dokumen	138.000.000	Bapeg Provsu

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja OPD Pelaksana
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	26.400.000	APBD		1 Laporan	219.360.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	1.000 Orang	84.956.000	APBD		1.100 Orang	234.970.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100%	312.362.372	APBD		100%	934.721.000	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	492 Dokumen	98.022.000	APBD		492 Dokumen	229.701.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1.000 PNS	145.510.372	APBD		1.100 PNS	322.520.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	53.470.000	APBD		110 Orang	262.500.000	Bapeg Provsu
5	03	02	1.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50 Laporan	15.360.000	APBD		55 Laporan	120.000.000	Bapeg Provsu
					UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI			1.578.155.928	APBD			2.234.139.400	
5	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100%	1.578.155.928	APBD		100%	2.214.139.400	
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Bapeg	100%	52.560.000	APBD		100%	50.280.000	
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	52.560.000	APBD		500 Dokumen	50.280.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	22.600.000	APBD		100%	210.315.000	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja OPD Pelaksana
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		20 PNS	-	APBD		20 PNS	80.095.000	
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	22.600.000	APBD		120 Orang	130.220.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah	100%	466.088.866	APBD		100%	635.400.000	
5	03	01	1.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.774.126	APBD		1 Paket	30.000.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	304.999.300	APBD		5 Paket	226.400.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	150.315.440	APBD		5 Paket	170.000.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Keperluan BAPEG	12 Paket	-	APBD		12 Paket	45.000.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	-	APBD		40 Dokumen	14.000.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	-	APBD		70 Laporan	150.000.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	868.480.400	APBD		100%	963.144.400	
6	03	01	1.09		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	0	APBD		60 Laporan	14.000.000	Bapeg Provsu
7	03	01	1.10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	198.736.000	APBD		12 Laporan	250.000.000	Bapeg Provsu

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja OPD Pelaksana
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	03	01	1.11		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0	APBD		4 Laporan	15.000.000	Bapeg Provsu
9	03	01	1.12		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	669.744.400	APBD		12 Laporan	684.144.400	Bapeg Provsu
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	168.426.662	APBD		100%	355.000.000	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	49.008.550	APBD		3 Unit	75.000.000	Bapeg Provsu
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	119.418.112	APBD		1 Unit	250.000.000	Bapeg Provsu
6	03	01	1.10		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0	APBD		20 Unit	30.000.000	Bapeg Provsu
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemnuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	0	APBD		100%	20.000.000	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100%	-	APBD		100%	20.000.000	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1.850 Dokumen	-	APBD		1.850 Dokumen	20.000.000	Bapeg Provsu
JUMLAH							100%	34.139.670.975			100%	39.978.337.918	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPEG PROVSU

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provsu Tahun 2026 secara garis besar proyeksi total kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp.34.139.670.975,- Jumlah keseluruhan anggaran Badan Kepegawaian Provsu berasal APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang akan dituangkan ke dalam DPA Kepegawaian Provsu Tahun 2026.

Pada tahun 2026 Kepegawaian Provsu akan menjalankan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Kepegawaian Daerah. Rencana Kerja tahun 2026, selain menjadi dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol dalam peningkatan kinerja Badan Kepegawaian pada tahun 2026 hal ini ditandai dengan adanya indikator kinerja yang disertai dengan target capaian kinerja serta pendanaan sehingga diperlukan konsistensi dan tanggung jawab dari bidang yang akan melaksanakan program dan kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan digunakan Badan Kepegawaian Provsu untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada draft Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 dan draft Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provsu tahun 2025-2029. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan proyeksi pagu pendanaan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.

5.1 Catatan Penting yang Perlu Diperhatikan.

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan agar berpedoman pada Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provsu tahun 2026 yang telah disusun.
2. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien, perlu menyusun skala prioritas program dan kegiatan, mengingat kemungkinan ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan.
3. Bidang yang mengampu Kegiatan dan Subkegiatan agar menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
4. Monitoring dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Provsu dilakukan secara berkala sebagai upaya mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran maka kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provsu harus tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Peraturan

Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan.

Rencana kerja Badan Kepegawaian Provsu Tahun 2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2025-2029. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provsu merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dan diharapkan berdampak positif terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

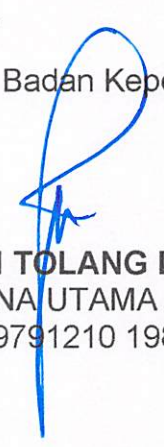
Rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Provsu adalah sebagai berikut:

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Provsu tahun 2026.
- Pelaksanaan kegiatan akan dievaluasi dan dilaporkan secara berkala ke Bappelitbang Provsu.
- Menyusun Rencana Aksi Badan Kepegawaian Provsu.
- Melakukan koordinasi internal Badan Kepegawaian Provsu untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, peningkatan efektifitas dan efisiensi capaian kinerja.

Demikian penyusunan dokumen Rencana Kerja ini disusun, dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Provsu.

Medan, 2025

Kepala Badan Kepegawaian


SUTAN TOLANG LUBIS, S.STP, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19791210 198910 1 001